

BAB IV

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang

Kabupaten Serang merupakan bagian dari Propinsi Banten yang mempunyai sejarah yang cukup panjang. Dari catatan yang ada, Pemerintah Kabupaten Serang telah mengalami 4 (empat) kali masa peralihan, yaitu:

- 1) Pemerintah Kesultanan Banten yang berkuasa selama \pm 290 tahun. Dimulai sejak Sultan Maulana Hasanudin yaitu tahun 1526 sampai tahun 1816. Saat berdirinya Keraton Surosowan sebagai pusat pemerintahan ditandai dengan penobatan Pangeran Sabakingking dengan Pangeran Hasanudin pada tanggal 1 Muharram 933 H / 8 Oktober 1526 M, yang kemudian dijadikan landasan penetapan sebagai hari jadi Kabupaten Serang.

- 2) Pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa selama ± 126 tahun yaitu pada tahun 1816 sampai dengan tahun 1942.
- 3) Pemerintah Jepang yang berjalan selama 3,6 tahun yaitu dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1945.
- 4) Pemerintah Republik Indonesia dimulai dari Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan sekarang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dilingkup Propinsi Jawa Barat. Kemudian pada tahun 2000 tepatnya tanggal 30 Oktober 2000 dibentuklah Propinsi Banten dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang pembentukan Propinsi Banten. Kabupaten Serang dan Kota yang ada di provinsi Banten hanya berjarak ± 70 Km dari Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, maka Kabupaten Serang berfungsi sebagai daerah Pemukiman, Industri, dan Pelabuhan. Luas wilayah

secara administratif tercatat seluas 173.409 Ha, yang terbagi atas 29 wilayah kecamatan dan 326 desa.

Sebelum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Serang berdiri, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) masih dalam penggabungan dengan Sekretariat Daerah yang disebut dengan bagian Anggaran dan Perbendaharaan, dan setelah ada SOTK baru dan ada beberapa perampingan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 yang disebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga berdirinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Serang yaitu pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah (PERDA) No. 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang , dan Peraturan Bupati (PERBUP) No. 54 Tahun 2016 tentang Sturuktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Serang. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang menyusun dokumen RENSTRA yang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Serang dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Serang yang mempunyai visi "*Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Maju, Sejahtera Dan Agamis*" dan untuk mendukung tercapainya visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Serang menjabarkan dalam melalui 5 (lima) misi, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, berakhlak mulia dan berbudaya;
- 2) Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah penataan ruang dan permukiman yang memadai, berkualitas dan berwawasan lingkungan;

- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dalam memperkuat struktur perekonomian daerah;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima didukung kapasitas birokrasi yang berintegritas, kompeten dan profesional;
- 5) Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara.

Kelima misi Pemerintah Kabupaten Serang ini, merupakan kerangka besar perencanaan yang diharapkan dapat mengakomodir semua kebutuhan masyarakat Kabupaten Serang yang secara teknis pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga teknis/PD yang membidangi dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih (*good government*) dan profesional.

B. Deskripsi Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu data real yang dikumpulkan dan sudah diolah dari berupa data Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan asli daerah per triwulan dari tahun 2010-2017 di Kabupaten Serang. yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang. Data real yang dikumpulkan dan sudah diolah adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun data real yang sudah diolah Pajak Daerah Kabupaten Serang tahun 2010-2017 diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.1
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 2010-2017

PAJAK DAERAH				
Thn	T. 1	T.2	T.3	T.4
2010	10.480.227.346	11.955.391.695	10.970.447.959	33.406.067.000
2011	19.218.686.080	22.424.786.480	35.367.475.692	76.456.948.252
2012	36.582.444.391	28.138.847.258	40.731.022.201	105.452.313.850
2013	41.778.073.857	48.420.591.197	66.354.269.871	156.552.934.925
2014	51.601.666.543	75.403.159.458	81.270.923.039	208.275.694.038
2015	68.140.227.144	84.358.818.762	74.216.333.772	226.715.429.678
2016	91.950.848.479	77.314.631.765	83.834.360.094	253.009.840.338
2017	71.225.142.322	103.341.743.683	98.654.147.669	273.633.139.555

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Manfaat dari masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggara pelayanan yang bersangkutan.

Adapun data real yang sudah diolah Retribusi Daerah Kabupaten Serang tahun 2010-2017 diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.2
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah 2010-2017

RETRIBUSI DAERAH				
Thn	T. 1	T.2	T.3	T.4
2010	14.813.339.003	14.372.475.065	22.720.375.409	51.906.189.477
2011	3.727.142.437	2.178.634.410	8.258.122.863	14.153.899.700
2012	4.552.651.822	5.314.882.330	6.675.805.686	16.541.339.838
2013	9.800.076.154	8.116.296.614	13.491.920.071	31.408.292.839
2014	3.726.416.327	8.540.919.499	8.365.733.678	20.653.069.509
2015	6.615.468.050	5.888.536.529	14.194.686.481	26.698.691.060
2016	6.827.584.618	6.099.324.662	13.723.981.572	26.650.890.752
2017	6.519.109.665	8.798.647.272	10.388.772.934	25.706.529.871

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin.

Adapun data real yang sudah diolah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang tahun 2010-2017 diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.3
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 2010-2017

PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Thn	T. 1	T.2	T.3	T.4
2010	41.819.133.859	30.080.825.754	40.216.044.704	112.116.004.317
2011	55.165.128.240	46.598.065.288	81.327.313.712	183.094.507.240
2012	73.390.486.087	54.314.673.852	88.637.708.289	216.342.868.228
2013	99.531.329.109	91.857.388.744	116.893.804.040	308.282.521.893
2014	103.200.317.499	142.457.094.117	149.677.822.986	395.335.234.602
2015	154.410.156.411	155.626.166.192	144.034.165.045	454.070.487.678
2016	163.502.908.174	138.766.965.423	154.975.885.673	457.245.759.270
2017	152.168.116.708	180.286.942.078	352.280.697.385	684.735.756.171

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

4. Hasil Pengolahan Data

1) Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

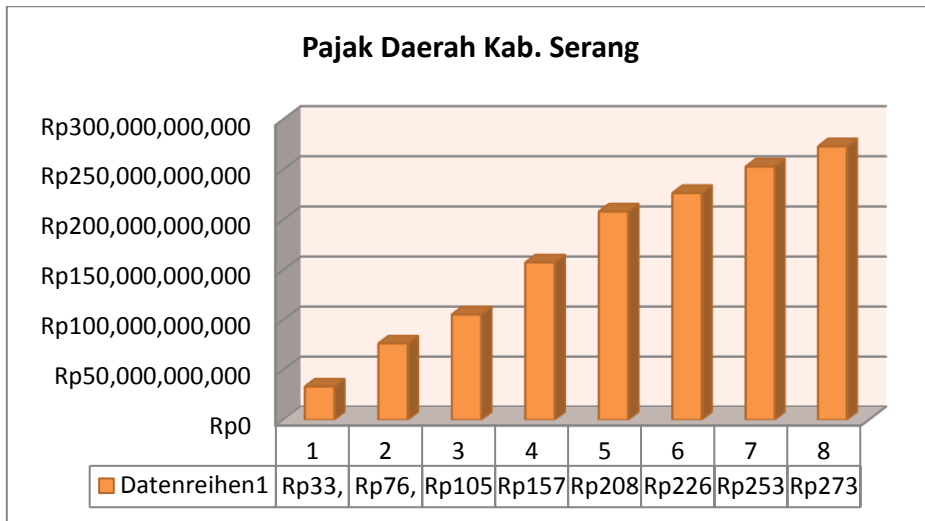
$$\text{PAD} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah} \times 100\%}{\text{Target PAD}}$$

Tabel 4.4
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Tahun	<u>Realisasi Pajak Daerah</u> <u>Target PAD</u>	X 100%	%
2010	<u>Rp. 33.406.067.000</u> Rp. 131.722.481.000	X 100%	25 %
2011	<u>Rp. 76.456.948.252</u> Rp. 183.094.507.240	X 100%	42 %
2012	<u>Rp. 105.452.313.850</u> Rp. 191.080.654.328	X 100%	55 %
2013	<u>Rp. 156.552.934.925</u> Rp. 233.612.280.044	X 100%	67 %
2014	<u>Rp. 208.275.694.038</u> Rp. 332.300.461.615	X 100%	63 %
2015	<u>Rp. 226.715.429.678</u> Rp. 435.518.044.044	X 100%	52 %
2016	<u>Rp. 253.009.840.338</u> Rp. 555.212.324.284	X 100%	45 %
2017	<u>Rp. 273.633.139.555</u> Rp. 773.309.234.817	X 100%	35 %

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Gambar 4.1
Gambaran Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD



Berdasarkan data yang telah diolah mengenai target dan realisasi penerimaan pajak daerah periode tahun 2010-2017, dapat dilihat bahwa kontribusi yang diberikan oleh realisasi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2010-2014 mengalami naik turun.

Pada tahun anggaran 2010 realisasi pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 25% dengan nilai Rp, 33.406.067.000,-, pada tahun anggaran 2011 kontribusi penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan sebesar

42% dengan nilai Rp, 76.456.948.252,-, pada tahun anggaran 2012 kontribusi yang diperoleh mengalami kenaikan kembali mencapai 55% dengan nilai Rp, 105.452.313.850,-, di tahun anggaran 2013 kontribusi meningkat mencapai 67% dengan nilai Rp, 156.552.934.925,-, di tahun anggaran 2014-2017 kontribusi mengalami penurunan secara signifikan mencapai 63% dengan nilai Rp, 208.715.429.038,-, di tahun 2015 sebesar 52% dengan nilai Rp, 226.715.429.678,-, di tahun 2016 sebesar 45% dengan nilai Rp, 253.009.840.338,-, dan di tahun anggaran 2017 kontribusi turun sebesar 35% dengan nilai Rp, 273.633.139.555,-.

Persentase pertumbuhan pajak daerah yang terlihat naik turun. Pada kurun tahun anggaran 2010/2011-2016/2017, nilai tertinggi ditahun 2010-2011 terlihat bahwa persentase pertumbuhan mencapai 128%, dan nilai terendah ditahun 2016/2017 sebesar 8%.

2) Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD

$$\text{PAD} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah} \times 100\%}{\text{Target PAD}}$$

Tabel 4.5

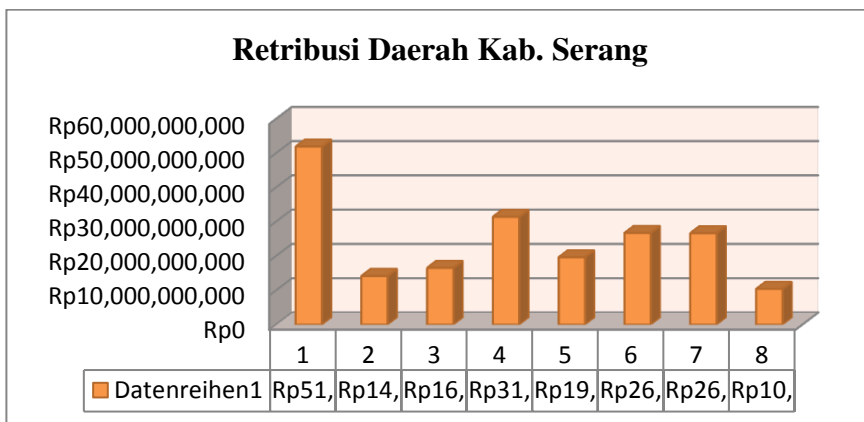
Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD

Tahun	<u>Realisasi Pajak Daerah</u> Target PAD	X 100%	%
2010	<u>Rp. 51.906.189.477</u> Rp. 131.722.481.000	X 100%	39%
2011	<u>Rp. 14.153.899.700</u> Rp. 183.094.507.240	X 100%	8%
2012	<u>Rp. 16.541.339.838</u> Rp. 191.080.654.328	X 100%	9%
2013	<u>Rp. 31.408.292.839</u> Rp. 233.612.280.044	X 100%	13%
2014	<u>Rp. 20.653.069.509</u> Rp. 332.300.461.615	X 100%	6%
2015	<u>Rp. 26.698.691.060</u> Rp. 435.518.044.044	X 100%	6%
2016	<u>Rp. 26.650.890.752</u> Rp. 555.212.324.284	X 100%	5%
2017	<u>Rp. 25.706.529.871</u> Rp. 773.309.234.817	X 100%	3%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Gambar 4.2

Grafik Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD



Sama halnya dengan Pajak Daerah, kontribusi yang diberikan oleh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Serang mengalami naik turun selama delapan tahun ini yaitu dari tahun 2010-2017.

Dari data diatas dapat dilihat pada tahun 2010 retribusi daerah memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 39% dengan nilai sebesar Rp. 51.906.189.477,- , di tahun 2011 kontribusi penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan yang sangat drastis hanya mencapai 8% dengan nilai Rp. 14.153.899.700.- , tahun 2012 naik hanya mencapai 9% dengan nilai Rp.

16.541.339.838,- , tahun 2013 mengalami peningkatan tidak terlalu besar hanya mencapai 13% dengan nilai Rp. 31.408.292.839,- , ditahun berikutnya retribusi daerah terus mengalami penurunan yaitu di tahun 2014 mencapai sebesar 6% dengan nilai Rp. 20.653.069.509, di tahun 2015 mencapai 6% dengan nilai Rp. 26.698.691.060, begitupun di tahun 2016 turun hanya mencapai 5% dengan nilai Rp. 26.650.890.752,- , dan di tahun 2017 kontribusi penerimaan retribusi daerah hanya mencapai 3% dengan nilai Rp. 25.706.529.871,- untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Serang.

Persentase pertumbuhan retribusi daerah yang terlihat bahwa persentase realisasi penerimaan pajak daerah mengalami penurunan pertumbuhan dari tahun ke tahun dari 2010/2011-2016/2017, bahkan mencapai minus 2,1%, ditahun 2015-2016, nilai tertinggi di tahun 2012/2013 mencapai 89%.

C. Uji Persyaratan Analisis

1. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test* dan diolah dengan *software SPSS 16.0* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.55768786
Most Extreme Differences	Absolute	.089
	Positive	.089
	Negative	-.085
Kolmogorov-Smirnov Z		.506
Asymp. Sig. (2-tailed)		.960

a. Test distribution is Normal.

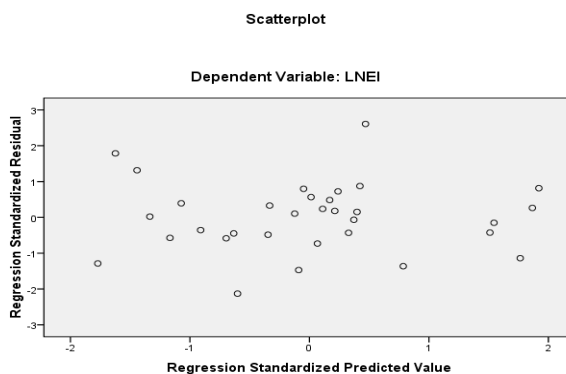
Berdasarkan *output* diatas, hasil *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai *Asymp. Sig* memiliki nilai lebih besar dari 0,05 yaitu dengan nilai 0,960. Hal ini menunjukkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi

normal dan model regresi tersebut layak dipakai untuk memprediksi Pajak Daerah, Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Serang.

2) Uji Heteroskedastisitas

Di bawah ini adalah gambar hasil uji heteroskedastisitas *scatterplot* dengan pengolahan data *software SPSS 16.0*, diperoleh *output* sebagai berikut :

Gambar 4.3
Uji Heteroskedastisitas (*Scatterplot*)



Dari gambar *scatterplot* diatas dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta penyebaran titik-titik melebar diatas dan dibawah sumbu Y pada angka 0, maka mengidentifikasikan bahwa pengaruh penerimaan pajak

daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Serang selama 2010-2017 tidak terdapat heteroskedastisitas. Untuk menegaskan data tidak terjadi heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji *Park* yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji *Park*)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.769	13.403		.505	.617
LN_X1	.148	.438	.066	.337	.738
LN_X2	-.473	.531	-.173	-.891	.380

a. Dependent Variable: LNEI

Untuk mengetahui data terjadi heteroskedastis yaitu dengan melihat *Sig*. Jika *Sig* lebih besar dari 0,05 maka data normal, dan jika nilai *Sig* lebih kecil dari 0,05 maka data tidak normal. Berdasarkan tabel diatas dilihat dari nilai *Sig*. Pajak Daerah 0,738 > 0,05 dan nilai *Sig*. Retribusi Daerah 0,380 > 0,05, mengidentifikasi bahwa pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah

terhadap PAD di Kabupaten Serang selama 2010-2017 tidak terdapat heteroskedastisitas.

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *Durbin Watson (DW Test)*. Berdasarkan pengujian uji autokorelasi dengan SPSS didapatkan *output* sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.965 ^a	.931	.926	3.85489E10	1.643

a. Predictors: (Constant), LAG_X2, LAG_X1

b. Dependent Variable: LAG_Y

Dari tabel 4.7 hasil uji autokorelasi, nilai DW_{hitung} sebesar 1,810. Diperoleh nilai dalam tabel DW untuk “K=2” dan “N=32” adalah nilai dl (batas bawah) sebesar 1,3093 dan nilai du (batas atas) sebesar 1,5736. Berdasarkan pedoman uji statistik *Durbin Watson*, maka

dapat dilihat bahwa nilai DW_{hitung} terletak diantara ($du < d < 4-du$), yaitu sebesar $1,5736 < 1,643 < 2,4264$. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak ada autokorelasi.

4) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Apabila nilai VIF berada dibawah 10,00 dan nilai *Tolerance* lebih dari 0,10, maka diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinieritas. Berdasarkan pengujian uji multikolinieritas dengan *SPSS* didapatkan *output* sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.218E9	9.370E9			
	LAG_X1	1.913	.126	.933	.661	1.512
	LAG_X2	.669	.771	.053	.661	1.512

a. Dependent Variable: LAG_Y

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa nilai *VIF* semua variabel independen kurang dari 10 yaitu dengan nilai 1,512 dan nilai *Tolerance* semua variabel independen lebih dari 0,10 yaitu 0,661. Nilai *VIF* untuk variabel pajak daerah sebesar 1,512 dengan nilai *Tolerance* sebesar 0,661. Nilai *VIF* untuk variabel retribusi daerah sebesar 1,512 dengan nilai *Tolerance* sebesar 0,661. Dengan demikian dapat disimpulkan model persamaan regresi tidak terdapat multikolinieritas.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisa regresi linier berganda digunakan untuk mengukur ada tidaknya pengaruh antara variabel (X) terhadap variabel (Y). Hasil olah data diatas dapat ditampilkan dari *output* dan persamaan analisis linier berganda sebagai berikut :

Tabel 4.10

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.218E9	9.370E9		.770	.448
LAG_X1	1.913	.126	.933	15.235	.000
LAG_X2	.669	.771	.053	.867	.394

a. Dependent Variable: LAG_Y

$$Y = \beta Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$PAD = \text{Lag } 7218293898.360 + \text{Lag } 1.913 (X_1) + \text{Lag } 0.669 (X_2) + e$$

Dari persamaan hasil regresi diatas mempunyai arti yang dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Konstanta (nilai mutlak Y), apabila pajak daerah dan retribusi daerah sama dengan nol, maka PAD di Kab. Serang sebesar 7218293898.360.
- 2) Koefisien regresi X_1 (Pajak Daerah), 1.913, artinya apabila pajak daerah naik sebesar satu satuan rupiah, maka dapat meningkatkan PAD di Kab. Serang atau berpengaruh sebesar 1.913 bila variabel konstan.
- 3) Koefisien regresi X_2 (Retribusi Daerah), 0.669, artinya apabila terjadi kenaikan pada variabel retribusi daerah dalam satu satuan rupiah, maka dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 0.669 dimana dalam keadaan konstan.

3. Pengujian Hipotesis

1) Uji T (Parsial)

Berikut *output* Uji t yang diolah menggunakan *SPSS 16.0* akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji T (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.218E9	9.370E9		.770	.448
LAG_X1	1.913	.126	.933	15.235	.000
LAG_X2	.669	.771	.053	.867	.394

a. Dependent Variable: LAG_Y

Jika nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} , taraf signifikansi 5%:2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) = n-k-1 atau 32-2-1 = 29. Dengan pengujian 2 sisi (signifikan = 0,025), maka hasil diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 2,04523. Sehingga didapat hasil pengujian sebagai berikut:

- a. Variabel pajak daerah memiliki t_{hitung} sebesar 14,235 dengan taraf signifikan 0,000 dibawah signifikansi 0,05 (5%). Dengan demikian $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $14,235 < 2,04523$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kab.

Serang. Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis H_a ditolak dan H_0 diterima. Dengan demikian pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Serang.

- b. Variabel retribusi daerah memiliki t_{hitung} 0,867 dengan taraf signifikansi 0,394 diatas signifikansi 0,05 (5%). Dengan demikian $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $0,867 < 2,04523$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kab. Serang. Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis H_a ditolak dan H_0 diterima.

2) Uji F (Simultan)

Hasil uji F untuk penelitian ini dengan menggunakan pengolahan data *SPSS 16.0* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.577E23	2	2.789E23	187.653	.000 ^a
	Residual	4.161E22	28	1.486E21		
	Total	5.993E23	30			

a. Predictors: (Constant), LAG_X2, LAG_X1

b. Dependent Variable: LAG_Y

Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima, dan jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak. Dan jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima, sedangkan jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak. Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($187.653 > 3,33$) maka H_0 ditolak. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka H_0 ditolak. Artinya secara simultan variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kab. Serang.

3) Koefisien Korelasi

Output koefisien korelasi dalam penelitian ini dengan menggunakan pengolahan data *SPSS 16.0* dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.13

Hasil Koefisien Korelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.965 ^a	.931	.926	3.85489E10	1.643

a. Predictors: (Constant), LAG_X2, LAG_X1

b. Dependent Variable: LAG_Y

Tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi (R) adalah 0,965 terletak pada interval koefisien 0,80-1,000 yang berarti tingkat hubungan antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah adalah Sangat Kuat.

4) Koefisien Determinasi R²

Output Koefisien determinasi R² dengan menggunakan pengolahan data *SPSS 16.0* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.14**Hasil Koefisien Determinasi R²****Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.965 ^a	.931	.926	3.85489E10	1.643

a. Predictors: (Constant), LAG_X2, LAG_X1

b. Dependent Variable: LAG_Y

Dari tabel diatas nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,931. Hal ini berarti variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar $0,931 \times 100 = 93,1\%$. Artinya tingkat pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 93,1%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar $100\% - 93,1\% = 6,9\%$ dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya diluar model.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Efektivitas Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dari hasil penelitian tentang efektifitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Serang selama 2010-2017 kurang efektif, karena kontribusi yang diberikan hanya sekitar 10-70 % tidak memenuhi target yaitu sebesar 100%. Terlihat pada efektifitas pajak daerah tertinggi pada tahun 2013 sebesar 67% di Kabupaten Serang selama kurun waktu 2010-2017 dengan nilai Rp. 156.552.934.925,- . Sedangkan yang terendah ada di tahun 2010 di Kabupaten Serang sebesar 25% dengan nilai Rp. 33.406.067.000,- . Dan terlihat pada efektifitas retribusi daerah tertinggi pada tahun 2013 sebesar 13% di Kabupaten Serang selama kurun waktu 2010-2017 dengan nilai Rp. 31.408.292.839,- . Sedangkan yang terendah ada di tahun 2017 di Kabupaten Serang sebesar 3% mencapai nilai Rp. 25.706.529.871,-.

Dengan melihat rata-rata pajak daerah dan retribusi daerah di Kab. Serang selama 2010-2017 yang kurang dari 100% membuat setiap tahunnya pajak daerah dan

retribusi daerah kurang efektif. Hal ini dikarenakan obyek dari keduanya kurang mumpuni di Kabupaten Serang dan kurang efisiennya dalam mengelola keuangan daerah, kurang kerjasama antar lembaga dengan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan untuk menggali obyek-obyek dari pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan PAD dan membangun kesejahteraan masyarakat.

2. Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Serang adalah sebesar 93,1%. Hal ini dapat dilihat dari *R Square* sebesar (0,931), nilai tersebut berarti bahwa pajak daerah dan retribusi daerah sangat berpengaruh 93,1% terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan sisanya sebesar 6,9,% ($100\% - 93,1\% = 6,9\%$) dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari penelitian ini seperti, pengelolaan kekayaan daerah, dan lai-lain pendapatan yang sah.

E. Analisis Ekonomi

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila semakin tinggi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang didapat menunjukkan akan semakin tinggi pula peningkatan pendapatan asli daerah yang didapat. Jika suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi maka akan berdampak positif terhadap pendapatan daerah. Akan tetapi hasil dari olah data berbanding terbalik dengan ketentuan berlaku, kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan kurang efektif dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Serang dari tahun 2010-2017.